

**RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP)  
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfotik Tahun 2021 memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan memuat uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi. Secara umum, RTP Diskominfotik Tahun 2021 meliputi:

1. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Unit Kerja;
2. Penguatan di lingkungan pengendalian;
3. Pemetaan resiko yang dihadapi di dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi yang bertindak untuk mengendalikan resiko;

5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Dokumen RTP Diskominfotik Tahun 2021 ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada instansi pemerintahan. Dari Dokumen RTP ini, diharapkan seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 8 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

  
**FADHIL, S.Sos.,MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680919 199011 1 00**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Manfaat .....	3
1.5. Ruang Lingkup.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	
2.1. Pengertian SPIP .....	4
2.2. Tujuan SPIP.....	4
2.3. Unsur-Unsur dalam SPIP .....	5
BAB III PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA YANG DIHARAPKAN	
3.1. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfotik Tahun 2021 .....	7
3.2. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian .....	10
3.3. Analisis Resiko .....	13
3.4. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan .....	20
3.5. Informasi dan Komunikasi .....	21
3.6. Pemantauan dan Evaluasi .....	22
BAB IV PENUTUP .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di dalam penyelenggaraan

tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik di dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
5. Perwal Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh.

## **1.3. Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

#### **1.4. Manfaat**

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Pengelolaan aset dan keuangan dapat diselenggarakan secara handal, dan
5. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

#### **1.5. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian Diskominfo ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ditingkat Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2021.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa SPIP tersebut melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada instansi pemerintahan.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan Bupati atau Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.



SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi terhadap pencapaian atas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Unsur-Unsur dalam SPIP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur yang melekat padanya dimana hal tersebut dalam SPIP telah diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### **2. Penilaian Resiko**

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian resiko yang mencakup identifikasi resiko dan analisis resiko, baik resiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun resiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintahan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok atau tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian resiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para *stakeholders*.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemantauan SPIP dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

**BAB III**  
**PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TINGKAT UNIT**  
**KERJA YANG DIHARAPKAN**

**3.1. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfo Tahun 2021**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 yang berisi prioritasasi Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dinilai kemungkinan terjadinya resiko. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menghasilkan RTP ini adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfo Tahun 2021

Rekapitulasi dilakukan melalui pengisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh Pejabat Struktural Diskominfo yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan empat orang Kepala Bidang yang terdapat pada Diskominfo. Kuesioner CEE ini berisi delapan kategori pertanyaan lingkungan pengendalian Intern yang kemudian dilakukan pemberian nilai (*scoring*).

2. Melakukan Penilaian (*scoring*) Berdasarkan Jawaban Para Responden

Penilaian (*scoring*) dilakukan berdasarkan jawaban yang diberikan atas pertanyaan pada sub unsur lingkungan pengendalian. Skala penilaian bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2 Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan Jawaban	Simpulan Jawaban
1	1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun	Kurang Memadai
2	2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	
3	3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan	Memadai
4	4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain	

Berdasarkan jawaban yang dihimpun dari Kuesioner CEE yang telah diberikan, didapat penilaian terhadap pengendalian lingkungan Diskominfortik Kota Banda Aceh yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfo

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern sehingga mampu mendorong terciptanya kualitas perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan survey yang sudah dilakukan diperoleh beberapa simpulan Survey Persepsi berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh pejabat struktural Diskominfo Kota Banda Aceh yang bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan

				Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas
				Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Memadai	-	Memadai	-
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

### 3.2. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya kinerja Diskominfo

melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Tahapan yang dilakukan untuk melakukan tahapan ini adalah :

1. Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh

Pada Tahun 2021, Diskominfo menetapkan prioritas untuk menetapkan konteks resiko yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo menetapkan Tujuan, Sasaran dan IKU yang mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh beserta resiko yang akan muncul yang bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko		
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f
	Tujuan Strategis Pemda 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16 .19.01	Walikota Banda Aceh

2. Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Pemko Banda Aceh, Diskominfo menetapkan Tujuan, Sasaran, IKU yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo yang akan dilakukan Penilaian Resiko Strategis dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yang bisa dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfo  
Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko		
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh				
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	1. Persentase Website OPD yang Aktif	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	Kadis Kominfo
		2. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	Kadis Kominfo

### 3. Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfo Kota Banda Aceh

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, maka ditetapkan konteks resiko operasional yang didasarkan kepada Rencana Kerja (Renja) Diskominfo dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko operasional yang menjadi prioritas untuk ditangani yang bisa dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfo  
Kota Banda Aceh

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko yang Teridentifikasi			
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	R00.21.16.19.08	Kadis Kominfo/ Kabid PIP
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Perencanaan	Tidak terpenuhinya target SPBE	R00.21.16.19.42	Kadis Kominfo/ Kabid E-Government

Adapun Daftar Resiko Teridentifikasi bisa dilihat pada Form Lampiran.



### 3.3. Analisis Resiko

Penetapan hasil analisis resiko mengacu pada dua parameter, yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya resiko yang terdiri dari dua parameter. Parameter pertama yaitu besarnya dampak/konsekuensi dan parameter kedua yaitu kemungkinan frekuensi terjadinya resiko. Level resiko kemungkinan pada Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 3.7, sementara level resiko dampak bisa dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.7 Level Resiko Kemungkinan Diskominfo Kota Banda Aceh

Skala	Level Resiko	Kemungkinan
1	Sangat jarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan</li> <li>2. Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol</li> <li>3. Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun</li> </ol>
2	Jarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih cukup tinggi</li> <li>2. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun</li> </ol>
3	Sering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50</li> <li>2. Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun</li> </ol>
4	Sangat sering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan terjadi &gt; 50%</li> <li>2. Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun</li> </ol>

Tabel 3.8 Level Resiko Dampak Diskominfo Kota Banda Aceh

Skala	Level Resiko	Dampak
1	Rendah Sekali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan</li> <li>2. Menimbulkan kerusakan kecil</li> <li>3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d Rp100.000.000,00</li> <li>4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100 juta</li> <li>5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan</li> <li>6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi</li> </ol>

		<p>dlm skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)</p> <p>7. Adanya kerusakan kecil thd lingkungan</p>
2	Rendah	<p>1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</p> <p>2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan serius</p> <p>3. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,00</p> <p>4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp500 juta</p> <p>5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan</p> <p>6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media nasional)</p> <p>7. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan</p>
3	Tinggi	<p>1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>3. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d Rp1.000.000.000,00</p> <p>4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00</p> <p>5. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>7. Adanya kerusakan besar thd lingkungan</p>
4	Tinggi Sekali	<p>1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</p> <p>2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan</p>

		<p>perbaikan yang cukup lama</p> <p>3. Kerusakan fatal</p> <p>4. Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000,00</p> <p>5. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00</p> <p>6. Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>7. Merusak citra institusi dlm skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak</p> <p>8. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum</p>
--	--	---

Analisis resiko dilakukan dengan *Focused Group Discussion* (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pejabat struktural Diskominfo Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas resiko-resiko tersebut memperlihatkan peta atau matriks resiko yang bisa dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8 Peta/Matriks Resiko Diskominfortik Kota Banda Aceh

Matriks Analisis Resiko			Dampak/Konsekuensi			
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Resiko	Sangat Sering	4			RSP.21.16.19.01	ROO.21.16.19.08, ROO.21.16.19.42
	Sering	3		ROO.21.16.19.01, ROO.21.16.19.04, ROO.21.16.19.05	RSO.21.20.19.01, ROO.21.16.19.32, ROO.21.16.19.52, ROO.21.16.19.54	RSO.21.16.19.02, RSO.21.20.19.03
	Jarang	2	ROO.21.16.19.49	ROO.21.16.19.02, ROO.21.16.19.03, ROO.21.16.19.06, ROO.21.16.19.07, ROO.21.16.19.09, ROO.21.16.19.10, ROO.21.16.19.11, ROO.21.16.19.12, ROO.21.16.19.13, ROO.21.16.19.14, ROO.21.16.19.15, ROO.21.16.19.16, ROO.21.16.19.17, ROO.21.16.19.18, ROO.21.16.19.19, ROO.21.16.19.20, ROO.21.16.19.21, ROO.21.16.19.22, ROO.21.16.19.23, ROO.21.16.19.24, ROO.21.16.19.25, ROO.21.16.19.26, ROO.21.16.19.27, ROO.21.16.19.28, ROO.21.16.19.30, ROO.21.16.19.31, ROO.21.16.19.33, ROO.21.16.19.35, ROO.21.16.19.36, ROO.21.16.19.37, ROO.21.16.19.38, ROO.21.16.19.40, ROO.21.16.19.41, ROO.21.16.19.43, ROO.21.16.19.44, ROO.21.16.19.45, ROO.21.16.19.46, ROO.21.16.19.47, ROO.21.16.19.48, ROO.21.16.19.50, ROO.21.16.19.51, ROO.21.16.19.53, ROO.21.16.19.56, ROO.21.16.19.57, ROO.21.16.19.58, ROO.21.16.19.59, ROO.21.16.19.60	ROO.21.16.19.55	ROO.21.16.19.34
	Sangat jarang	1		ROO.21.16.19.29, ROO.21.16.19.39		

<b>Keterangan :</b>	<b>Sangat rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat tinggi</b>
---------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

Dari peta resiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 5 resiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi yaitu:
  - a. Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah (RSP.21.16.19.01);
  - b. Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update (RSO.21.16.19.02);
  - c. Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD (RSO.21.16.19.03);

- d. Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media) (ROO.21.16.19.08), dan
  - e. Tidak terpenuhinya target SPBE (ROO.21.16.19.42).
2. Terdapat 9 resiko yang mempunyai level tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sering dan dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu resiko:
- a. Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfo (RSO.21.20.19.01);
  - b. Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra (ROO.21.16.19.32);
  - c. Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan (ROO.21.16.19.52);
  - d. Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah (ROO.21.16.19.54);
  - e. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan (ROO.21.16.19.34);
  - f. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.01);
  - g. Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan (ROO.21.16.19.04);
  - h. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.05);
  - i. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.55);
3. Terdapat 47 resiko yang mempunyai level rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu resiko:
- a. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.02);
  - b. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.03);
  - c. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.06);
  - d. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.07);
  - e. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.09);

- f. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.10);
- g. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.11);
- h. Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi public (ROO.21.16.19.12);
- i. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.13);
- j. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.14);
- k. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.15);
- l. Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan (ROO.21.16.19.16);
- m. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.17)
- n. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.18);
- o. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.19);
- p. Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi (ROO.21.16.19.20);
- q. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.21);
- r. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.22);
- s. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.23);
- t. Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka (ROO.21.16.19.24);
- u. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.25);
- v. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.26);
- w. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.27);
- x. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG (ROO.21.16.19.28);
- y. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra (ROO.21.16.19.30);
- z. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.31);
- aa. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.33);
- bb. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.35);

- cc. Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan (ROO.21.16.19.36);
  - dd. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.37);
  - ee. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan (ROO.21.16.19.38);
  - ff. Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal (ROO.21.16.19.40);
  - gg. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.41);
  - hh. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.43);
  - ii. Masih lemahnya koordinasi TIK antar OPD (ROO.21.16.19.44);
  - jj. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.45);
  - kk. Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap (ROO.21.16.19.46);
  - ll. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.47);
  - mm. masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus (ROO.21.16.19.48);
  - nn. Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap (ROO.21.16.19.50);
  - oo. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.51);
  - pp. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.53);
  - qq. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah (ROO.21.16.19.56);
  - rr. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.57)
  - ss. Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki (ROO.21.16.19.58);
  - tt. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.59);
  - uu. Belum maksimalnya dataset OPD yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate (ROO.21.16.19.60);
4. Terdapat 3 resiko yang mempunyai level sangat rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah sekali, yaitu resiko:

- a. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.29);
- b. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.39);
- c. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.49);

### 3.4. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan bisa dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
a	b	c	d	e	f
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	Pembuatn Form Evaluasi Pelaksanaan Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih rendahnya kepatuhan Implementasi Perwal Nomor 2 tahun 2020 tentang pemerintahan berbasis elektronik	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak SKPD yang kurang aktif di dalam melakukan update website	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPIID
3	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan Dokumen Proses Bisnis Aplikasi Khusus yang Dimiliki	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak aspek SPBE yang belum terpenuhi	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap
4	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	ROO.21.16.19.08	Pengajuan Telaahan Staf penambahan tenaga jurnalis dan media	Masih dibutuhkan lebih banyak tenaga jurnalis dan media untuk memperbanyak dan mencapai target jumlah berita	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh
5	Tidak terpenuhinya target SPBE	ROO.21.16.19.42	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan membentuk Tim SPBE Kota Banda Aceh	Masih banyak aspek Arsitektur SPBE yang harus dilengkapi	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota



Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi resiko bisa dilihat pada form lampiran.

### 3.5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun yang direncanakan bisa dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pengkomunikasian Atas kegiatan Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
1	2	3	4	5
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Peraturan Walikota 4. Keputusan Walikota 5. Workshop/Seminar 6. Bimtek 7. Sosialisasi 8. Website/Portal	Diskominfotik, OPD Terkait	Kemenpan-RB, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Workshop 5. Bimtek 6. Sosialisasi 7. Website	Diskominfotik	SKPD, Masyarakat, Komunitas
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfotik	SKPD, Komunitas
4	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Website	Diskominfotik	SKPD, Komunitas, Masyarakat
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfotik	SKPD

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.

### 3.6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

#### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reviu. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bisa dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan
4	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.

2. **Evaluasi Terpisah**  
Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.
3. **Pelaksanaan Tindak lanjut**  
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tindak lanjutnya.
4. **Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**  
Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda Aceh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting pada penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan RTP yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo Tahun 2021 menjadi sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Diskominfo Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kadis

KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3						#N/A
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3						#N/A
3	Terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3						#N/A
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3						#N/A
<b>B.</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3						#N/A
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2						#N/A
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3						#N/A
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2						#N/A
<b>C.</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2						#N/A
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2						#N/A
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3						#N/A
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3						#N/A
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3						#N/A
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)	3						#N/A
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2						#N/A
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2						#N/A
<b>D.</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3						#N/A
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2						#N/A
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2						#N/A
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3						#N/A
<b>E.</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3						#N/A

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3					#N/A	
3	Kewenangan direviu secara periodik	2					#N/A	
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3					#N/A	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3					#N/A	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3					#N/A	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3					#N/A	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2					#N/A	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3					#N/A	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2					#N/A	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>						<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3					#N/A	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3					#N/A	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3					#N/A	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2					#N/A	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3					#N/A	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>						<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3					#N/A	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	2					#N/A	

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1 = Kadis Kominfo

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government

R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik



2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3						#N/A	
3	Kewenangan direviu secara periodik	3						#N/A	
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3						#N/A	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3						#N/A	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3						#N/A	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2						#N/A	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3						#N/A	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3						#N/A	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3						#N/A	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3						#N/A	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3						#N/A	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2						#N/A	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2						#N/A	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3						#N/A	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3						#N/A	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3						#N/A	

**Keterangan:**

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1 = Kadis Kominfortik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government

R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik



PK

**KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
<b>A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>									<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)			3				#N/A	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			3				#N/A	TIDAK MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik			3				#N/A	TIDAK MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku			4				#N/A	MEMADAI
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>									<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan			4				#N/A	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan			3				#N/A	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai			3				#N/A	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.			2				#N/A	KURANG MEMADAI?
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>									<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko			2				#N/A	KM
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan			2				#N/A	KM
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah			3				#N/A	M
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja			4				#N/A	M
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda			4				#N/A	M
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (cascading)			4				#N/A	M
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko			2				#N/A	KM
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko			2				#N/A	KM
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>									<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat			4				#N/A	M
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko			3				#N/A	M
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)			3				#N/A	M
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko			3				#N/A	M
<b>E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>									<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat			4				#N/A	M

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat			4			#N/A	M	
3	Kewenangan direviu secara periodik			4			#N/A	M	
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)			4			#N/A	M	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik			4			#N/A	M	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja			4			#N/A	M	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko			3			#N/A	KM	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)			3			#N/A	M	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan			4			#N/A	M	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM			4			#N/A	M	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik			4			#N/A	M	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya			4			#N/A	M	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP			4			#N/A	M	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.			3			#N/A	KM	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti			4			#N/A	M	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun			4			#N/A	M	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun			3			#N/A	M	

**Keterangan:**

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

- R1 = Kadis Kominfortik
- R2 = Sekretaris
- R3 = Kabid PIP
- R4 = Kabid E-Government
- R5 = Kabid Smart City
- R6 = Kabid Statistik

**KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSTONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)				4			#N/A	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai				4			#N/A	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik				3			#N/A	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku				3			#N/A	
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan				3			#N/A	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan				3			#N/A	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai				2			#N/A	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.				3			#N/A	
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko				3			#N/A	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan				3			#N/A	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah				4			#N/A	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja				3			#N/A	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda				3			#N/A	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasianl OPD ( <i>cascading</i> )				4			#N/A	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko				3			#N/A	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko				3			#N/A	
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat				3			#N/A	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko				3			#N/A	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)				3			#N/A	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko				3			#N/A	
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat				3			#N/A	

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat				3			#N/A	
3	Kewenangan direviu secara periodik				3			#N/A	
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)				3			#N/A	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik				3			#N/A	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja				3			#N/A	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko				3			#N/A	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)				3			#N/A	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan				3			#N/A	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM				3			#N/A	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik				3			#N/A	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya				3			#N/A	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP				3			#N/A	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.				3			#N/A	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti				3			#N/A	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun				3			#N/A	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun				3			#N/A	

**Keterangan:**

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1 = Kadis Kominfortik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government

R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik

18/2-21

**KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						Modus	SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
a	b	c							d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan Integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)					1		#N/A	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai					4		#N/A	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik					3		#N/A	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku					3		#N/A	
<b>B.</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan					3		#N/A	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan					2		#N/A	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai					3		#N/A	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.					2		#N/A	
<b>C.</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko					3		#N/A	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan					3		#N/A	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah					4		#N/A	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja					4		#N/A	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda					4		#N/A	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )					3		#N/A	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko					3		#N/A	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko					4		#N/A	
<b>D.</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat					4		#N/A	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko					4		#N/A	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)					4		#N/A	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko					3		#N/A	
<b>E.</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>								<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelcgasian wewenang telah ditentukan dengan tepat					3		#N/A	

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat					3	#N/A	
3	Kewenangan direviu secara periodik					3	#N/A	
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)					3	#N/A	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik					2	#N/A	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja					4	#N/A	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko					3	#N/A	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)					3	#N/A	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan					4	#N/A	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM					2	#N/A	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik					3	#N/A	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya					3	#N/A	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP					3	#N/A	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.					3	#N/A	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti					3	#N/A	
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun					4	#N/A	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun					4	#N/A	

**Keterangan:**

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

- R1 = Kadis Kominfortik
- R2 = Sekretaris
- R3 = Kabid PIP
- R4 = Kabid E-Government
- R5 = Kabid Smart City
- R6 = Kabid Statistik

Kabid. RC

**KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2021

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							Modus	SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	d		
a	b	c								
<b>A. PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>										<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)							3	#N/A	memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai							3	#N/A	memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik							3	#N/A	memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku							3	#N/A	memadai
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>										<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan							3	#N/A	memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan							3	#N/A	memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai							3	#N/A	memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.							2	#N/A	k. memadai
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>										<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko							2	#N/A	k. memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan							2	#N/A	k. memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah							3	#N/A	memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja							4	#N/A	memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda							3	#N/A	memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (cascading)							4	#N/A	memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko							2	#N/A	k. memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko							2	#N/A	k. memadai
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>										<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat							3	#N/A	memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							4	#N/A	memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)							4	#N/A	memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko							3	#N/A	memadai
<b>E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>										<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat							4	#N/A	memadai

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat					4	#N/A	memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik					4	#N/A	memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)					4	#N/A	memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik					3	#N/A	l. memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja					4	#N/A	memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko					3	#N/A	memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)					3	#N/A	memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan					4	#N/A	memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM					4	#N/A	memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik					4	#N/A	memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya					4	#N/A	memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP					3	#N/A	memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.					3	#N/A	memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti					4	#N/A	memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							<b>MEMADAI/ KURANG MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun					4	#N/A	memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun					3	#N/A	memadai

**Keterangan:**

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

- R1 = Kadis Kominfo
- R2 = Sekretaris
- R3 = Kabid PIP
- R4 = Kabid E-Government
- R5 = Kabid Smart City
- R6 = Kabid Statistik

15/02/2021



### Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Daftar Urutan Kepangkatan Dinas	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Komitmen terhadap kompetensi
2	RKA/DPA	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Komitmen terhadap kompetensi
3	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kepemimpinan yang Kondusif
4	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kepemimpinan yang Kondusif
5	Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kepemimpinan yang Kondusif
6	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kepemimpinan yang Kondusif
7	Dokumen Kontrak Pegawai Non-PNS Dinas	Masih banyaknya pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara/pegawai kontrak)	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan kebutuhan

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

### Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021

No.	Sub unsur	Hasil Reviu		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan
				Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas
				Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko

4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Memadai	-	Memadai	-
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



*[Handwritten signature]*

Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

### PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2017-2022
Sumber Data	: RPJM Tahun 2017-2022
<b>Visi</b>	: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat</li> <li><b>5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b></li> <li>6. Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan</li> <li>7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>
<b>Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda</b>	5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Terwujudnya Nilai-Nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh</li> <li>2.1 Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang Bermutu, Berdaya Saing, berkarakter islami dan berprestasi</li> <li>3.1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</li> <li>4.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat</li> <li><b>5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b></li> <li>6.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan</li> <li>7.1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk</li> </ol>
<b>Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda</b>	5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran RPJMD	<p>1.1.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam</p> <p>2.1.1 Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan</p> <p>3.1.1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>4.1.1 Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat</p> <p>5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi</p> <p><b>5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b></p> <p>6.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni</p> <p>6.1.2 Mitigasi kebencanaan yang tangguh</p> <p>6.1.3 Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan</p> <p>7.1.1 Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak</p> <p>7.1.2 Pengendalian pertumbuhan penduduk</p>
<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>	5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
IKU Sasaran RPJMD	<p>1.1.1.1 Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh</p> <p>2.1.1.1 Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah</p> <p>3.1.1.1 Angka Kemiskinan</p> <p>3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>3.1.1.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi</p> <p>4.1.1.1 Persentase Indikator Kota Sehat yang Terpenuhi</p> <p>5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p><b>5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b></p> <p>6.1.1.1 Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni</p> <p>7.1.1.1 Indeks Pembangunan Gampong (IPG)</p> <p>7.1.1.2 Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi</p>
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>	5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Prioritas pembangunan dan program unggulan	-
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
Nama Dinas Terkait	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

<p>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Tujuan 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p> <p>IKU 5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
--	---

Banda Aceh, 08 Februari 2021

☞ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



*[Handwritten Signature]*  
Fadmi, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001


**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	
Tahun Penilaian	:	2021	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2017-2022	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
Sumber Data	:	Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh	
Tujuan Strategis	:	Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	
Sasaran Strategis	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik</li> </ol>	
IKU Renstra OPD	:	<b>IKU</b>	
		1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat	<b>Tahun 2021</b> 20%
		2. Persentase Website OPD yang Aktif	75%
		3. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	50%
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi &amp; Komunikasi Publik</li> <li>2. Aplikasi Informatika</li> <li>3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ol>	
Informasi Lain		-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan Penilaian Risiko		<p><b>Tujuan Strategis :</b>  <b>Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh</b></p> <p><b>Sasaran Strategis :</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik</li> </ol> </p> <p><b>IKU Strategis :</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi</li> <li>2. Persentase Website OPD yang Aktif</li> <li>3. Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan</li> </ol> </p>	

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



  
Radhi, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001




**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	
Tahun Penilaian	:	2021	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2017-2022	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
Sumber Data	:	Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh	
Tujuan Strategis	:	Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	
Program Diskominfotik dan Kegiatan Utama	:	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Informasi &amp; Komunikasi Publik</li> <li>2. Program Aplikasi Informatika</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ol> <p>Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi &amp; Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota</li> <li>2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota</li> <li>3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota</li> <li>4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota</li> <li>4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota</li> </ol>	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li> <li>1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</li> <li>1.1.3 Pelayanan Informasi Publik</li> <li>1.1.4 Layanan Hubungan Media</li> <li>1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan</li> <li>1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</li> <li>1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</li> <li>2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</li> <li>2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota</li> <li>2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> <li>2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li> <li>2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</li> <li>3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li> <li>3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</li> <li>4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</li> <li>4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota</li> </ol>	<p>12 Aspirasi 600 Berita</p> <p>12 Permohonan 5 Media 10 Kali 45 Orang 1 Kali</p> <p>44 SKPD 47 Orang</p> <p>1 Tahun 1 Dokumen 3 Aplikasi</p> <p>2 Jenis</p> <p>68 Orang</p> <p>34 OPD</p> <p>1 Tahun</p> <p>200 Surat</p>
Informasi Lain	:	-	

<p>Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Informasi &amp; Komunikasi Publik</li> <li>2. Program Aplikasi Informatika</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</li> <li>4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ol> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi &amp; Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota</li> <li>2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota</li> <li>3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kota</li> <li>4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota</li> <li>4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota</li> </ol> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li> <li>1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</li> <li>1.1.3 Pelayanan Informasi Publik</li> <li>1.1.4 Layanan Hubungan Media</li> <li>1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan</li> <li>1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</li> <li>1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</li> <li>2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</li> <li>2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota</li> <li>2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li> <li>2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li> <li>2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</li> <li>3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li> <li>3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor</li> <li>4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</li> <li>4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota</li> </ol>
--	---

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh


  
 Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

### Identifikasi Risiko Strategis Pemda

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : RPJMD 2017-2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	Walikota Banda Aceh	Rendahnya Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Berbasis Elektronik	Internal	C	1. Tidak Efesiennya Belanja TIK 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo) 3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh	Walikota, OPD Terkait, Masyarakat

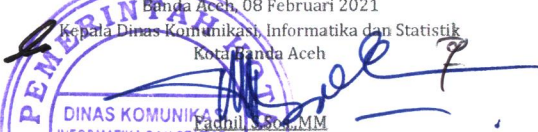
Banda Aceh, 08 Februari 2021  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh  
  
 Fadhi, S.Sos.,MM  
 Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



**IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra 2017-2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Sasaran strategis OPD : 1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi  
 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh									
	Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfo	RSO.21.20.19.01	Kadis Kominfortik	Belum bakunya standar data yang digunakan serta kurangnya petugas ahli	Internal	C	Tidak tersedianya data statistik sektoral yang lengkap, baku dan terbaru	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	1. Persentase Website OPD yang Aktif 2. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.02 RSO.21.16.19.03	Kadis Kominfortik Kadis Kominfortik	OPD kurang aktif di dalam melakukan update berita dan informasi melalui website yang dikelola Terbatasnya SDM, Sarana dan Prasarana TIK serta lemahnya koordinasi dan Integrasi TIK	Internal Internal	C C	Informasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota yang bisa diterima oleh masyarakat tidak update Tidak tercapainya target Indeks Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh Pemko Banda Aceh

Banda Aceh, 08 Februari 2021  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh  
  
 Fadnil Sidiq M  
 Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra 2017-2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Sasaran strategis OPD : 1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi  
 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.01	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat	
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.02		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait					Perencanaan tidak matang dan terstruktur
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.03		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur					Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan	R00.21.16.19.04		Evaluasi hanya dilakukan saat ada aspirasi atau pengaduan saja					Respon yang diberikan kepada warga tidak memuaskan
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.05	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat	
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.06		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait					Perencanaan tidak matang dan terstruktur
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.07		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur					Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	R00.21.16.19.08		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas berita, informasi dan liputan					Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak mencapai target
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.09	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat	
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.10		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Informasi Publik					Perencanaan tidak matang dan terstruktur
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.11		Kurangnya SDM di dalam mengelola permohonan informasi publik yang diterima					Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan permohonan informasi publik
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi publik	R00.21.16.19.12		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas permohonan informasi publik					Informasi publik yang dimohon tidak lengkap direspon, diverifikasi dan diberikan
4	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.13	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat	
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.14		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait informasi yang harus didesiminasikan					Perencanaan tidak matang dan terstruktur
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.15		Kurangnya SDM di dalam mendesiminasikan informasi					Tidak terpenuhinya target laporan informasi yang didesiminasikan
			Pemantauan dan Evaluasi	Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	R00.21.16.19.16		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas media yang digunakan					Kurang maksimal di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan
5	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.17	Kadis Kominfotik/Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat	
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.18		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan sosialisasi					Perencanaan tidak matang dan terstruktur
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.19		Kurangnya SDM di dalam melakukan proses pelaporan pelaksanaan sosialisasi					Tidak terpenuhinya target pelaksanaan sosialisasi
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi	R00.21.16.19.20		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi					Target lokasi yang dipilih sebagai tempat sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran

6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.21	Kadis Kominfotik/Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.22		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.23		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka	R00.21.16.19.24		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas SDM yang diberikan pelatihan			Tidak terlaksananya prosesi pelatihan SDM	
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.25	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.26		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan KIG			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.27		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan KIG	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG	R00.21.16.19.28		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas KIG yang diberikan pelatihan			Anggaran tidak terserap secara maksimal	
8	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.29	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra	R00.21.16.19.30		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan layanan jaringan intra yang diberikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.31		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target layanan jaringan intra yang diberikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra	R00.21.16.19.32		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas jaringan intra yang diberikan			Layanan Jaringan Intra belum maksimal	
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.33	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan	R00.21.16.19.34		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan pembuatan proses bisnis			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.35		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target dokumen proses bisnis yang disiapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan	R00.21.16.19.36		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas aplikasi yang dibuat			SDM Pemda tidak mampu untuk membuat dokumen proses bisnis	
10	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.37	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan	R00.21.16.19.38		Kurangnya perencanaan spesifikasi pusat data yang sesuai dengan standar			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.39		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target standar pusat data yang diharapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal	R00.21.16.19.40		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada layanan pusat data yang diberikan			Layanan pusat data yang dimiliki tidak maksimal digunakan oleh OPD	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.41	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Tidak terpenuhinya target SPBE	R00.21.16.19.42		Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE Kota			Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan perencanaan Arsitektur TIK Kota	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.43		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Kota Dokumen Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pemantauan dan Evaluasi	Masih lemahnya koordinasi TIK antar OPD	R00.21.16.19.44		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada layanan TIK yang dimiliki Diskominfotik			Sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar	
12	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.45	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap	R00.21.16.19.46		Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan prosedur dan kelengkapan pengembangan aplikasi khusus			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak memiliki dokumen perencanaan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.47		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Tidak terpenuhinya target aplikasi khusus yang sesuai standar	
			Pemantauan dan Evaluasi	masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus	R00.21.16.19.48		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak sesuai standar	

13	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.49	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap	R00.21.16.19.50		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal prosedur dan kelengkapan Penguatan Command Center Kota			Command Center Kota tidak memiliki dasar perencanaan yang lengkap	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.51		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan	R00.21.16.19.52		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada pengadaan sarana tanpa pertimbangan standar yang diharapkan			Tidak terpenuhinya target penguatan command center kota sesuai standar	
14	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.53	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah	R00.21.16.19.54		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal peningkatan perencanaan mutu integrasi statistik daerah			Rendahnya kualitas mutu dokumen perencanaan yang dilaksanakan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.55		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah	R00.21.16.19.56		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada SDM integrasi statistik daerah			OPD tidak mampu di dalam melengkapi mutu integrasi data statistik daerah yang diharapkan	
15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.57	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki	R00.21.16.19.58		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal bentuk dataset yang baku			Rendahnya kualitas mutu dokumen perencanaan yang dilaksanakan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.59		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum maksimalnya dataset OPD yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	R00.21.16.19.60		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada OPD terkait dengan proses verifikasi, validasi, analisis dan update dataset yang dimiliki			Dataset OPD tidak bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	

Banda Aceh, 08 Februari 2021  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh  
 Fadul S. Sos. MM  
 Dinas Utama Banda Aceh / 19680919 199011 1 001



### Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>					
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	3	4	12
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>					
1	Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfo	RSO.21.20.19.01	3	3	9
2	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	4	3	12
3	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	3	4	12
<b>III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.01	2	3	6
2	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.02	2	2	4
3	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.03	2	2	4
4	Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan	R00.21.16.19.04	2	3	6
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.05	2	3	6
6	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.06	2	2	4
7	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.07	2	2	4
8	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	R00.21.16.19.08	4	4	16
9	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.09	2	2	4
10	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.10	2	2	4
11	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.11	2	2	4
12	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi publik	R00.21.16.19.12	2	2	4
13	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.13	2	2	4
14	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.14	2	2	4
15	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.15	2	2	4
16	Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	R00.21.16.19.16	2	2	4
17	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.17	2	2	4
18	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.18	2	2	4
19	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.19	2	2	4



20	Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi	R00.21.16.19.20	2	2	4
21	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.21	2	2	4
22	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.22	2	2	4
23	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.23	2	2	4
24	Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka	R00.21.16.19.24	2	2	4
25	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.25	2	2	4
26	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.21.16.19.26	2	2	4
27	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.27	2	2	4
28	Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG	R00.21.16.19.28	2	2	4
29	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.29	2	1	2
30	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra	R00.21.16.19.30	2	2	4
31	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.31	2	2	4
32	Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra	R00.21.16.19.32	3	3	9
33	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.33	2	2	4
34	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan	R00.21.16.19.34	4	2	8
35	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.35	2	2	4
36	Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan	R00.21.16.19.36	2	2	4
37	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.37	2	2	4
38	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan	R00.21.16.19.38	2	2	4
39	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.39	2	1	2
40	Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal	R00.21.16.19.40	2	2	4
41	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.41	2	2	4
42	Tidak terpenuhinya target SPBE	R00.21.16.19.42	4	4	16
43	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.43	2	2	4
44	Masih lemahnya koordinasi TIK antar OPD	R00.21.16.19.44	2	2	4
45	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.45	2	2	4
46	Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap	R00.21.16.19.46	2	2	4
47	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.47	2	2	4
48	masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus	R00.21.16.19.48	2	2	4
49	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.49	1	2	2
50	Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap	R00.21.16.19.50	2	2	4
51	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.51	2	2	4
52	Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan	R00.21.16.19.52	3	3	9
53	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.53	2	2	4
54	Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah	R00.21.16.19.54	3	3	9
55	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.55	3	2	6
56	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah	R00.21.16.19.56	2	2	4
57	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.21.16.19.57	2	2	4

58	Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki	R00.21.16.19.58	2	2	4
59	Laporan tidak lengkap	R00.21.16.19.59	2	2	4
60	Belum maksimalnya dataset OPD yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	R00.21.16.19.60	2	2	4

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh

DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN STATISTIK

Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

### Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>						
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	12	Walikota	Rendahnya Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Tidak Efesiennya Belanja TIK 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo) 3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	12	Kadis Kominfotik	OPD kurang aktif di dalam melakukan update berita dan informasi melalui website yang dikelola	Informasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota yang bisa diterima oleh masyarakat tidak update
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	12	Kadis Kominfotik	Terbatasnya SDM , Sarana dan Prasarana TIK serta lemahnya koordinasi dan Integrasi TIK	Tidak tercapainya target Indeks Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota
<b>III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						
1	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	ROO.21.16.19.08	16	Kabid PIP	Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas berita, informasi dan liputan	Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak mencapai target
2	Tidak terpenuhinya target SPBE	ROO.21.16.19.42	16	Kabid E-Government	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE Kota	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan perencanaan Arsitektur TIK Kota

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>							
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	Pembuatn Form Evaluasi Pelaksanaan Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih rendahnya kepatuhan Implementasi Perwal Nomor 2 tahun 2020 tentang pemerintahan berbasis elektronik	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Koordinator SPBE Kota Banda Aceh (Sekda) 2. Kepala Dinas Kominfotik 3. OPD Terkait	Triwulan IV
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>							
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak SKPD yang kurang aktif di dalam melakukan update website	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Kadis Kominfotik	Triwulan II

2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan Dokumen Proses Bisnis Aplikasi Khusus yang Dimiliki	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak aspek SPBE yang belum terpenuhi	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	Kadis Kominfortik	Triwulan II
<b>III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>							
1	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	ROO.21.16.19.08	Pengajuan Telaahan Staf penambahan tenaga jurnalis dan media	Masih dibutuhkan lebih banyak tenaga jurnalis dan media untuk memperbanyak dan mencapai target jumlah berita	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	Kabid PIP	Triwulan II
2	Tidak terpenuhinya target SPBE	ROO.21.16.19.42	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan membentuk Tim SPBE Kota Banda Aceh	Masih banyak aspek Arsitektur SPBE yang harus dilengkapi	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Kabid E-Government	Triwulan III

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Peraturan Walikota 4. Keputusan Walikota 5. Workshop/Seminar 6. Bimtek 7. Sosialisasi 8. Website/Portal	Diskominfo, OPD Terkait	Kemenpan-RB, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas	Triwulan IV	Oktober 2021	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Workshop 5. Bimtek 6. Sosialisasi 7. Website	Diskominfo	SKPD, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II	Juni 2021	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat

3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfotik	SKPD, Komunitas	Triwulan II	Mei 2021	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi dokumen
4	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Website	Diskominfotik	SKPD, Komunitas, Masyarakat	Triwulan II	Juni 2021	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dan Dokumentasi berupa notulen
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfotik	SKPD	Triwulan III	September 2021	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi laporan

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

Nama Dinas : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Daerah (Koordinator SPBE)	Mei, Oktober, Desember 2021	Mei, Oktober, Desember 2021	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2021	April, Oktober, Desember 2021	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2021	April, Oktober, Desember 2021	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
4	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid PIP	Mei, November, Desember 2021	Mei, November, Desember 2021	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid E-Government	Mei, November, Desember 2021	Mei, November, Desember 2021	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

Nama Dinas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>									
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.21.16.19.01	Des-21	Tidak Terlaksananya Implementasi Sesuai Rencana Aksi	Nilai Indeks SPBE Rendah	Terjadi	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	Triwulan IV	Oktober 2021	Menunggu Penilaian Asessor Eksternal (Kemenpan-RB)
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>									
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.21.16.19.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Triwulan II	Juni 2021	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.21.16.19.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	Triwulan II	Mei 2021	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik										
1	Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)	ROO.21.16.19.08	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	Triwulan II	Juni 2021	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
2	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE Kota	ROO.21.16.19.42	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Triwulan III	September 2021	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

Banda Aceh, 08 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK																																						
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syaria'h																																					
MISI	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik																																					
TUJUAN RPJM	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik																																					
SASARAN RPJM	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)																																					
IKU RPJM	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik																																					
TUJUAN SKPD	Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Berintegrasi dalam Kota Banda Aceh																																					
SASARAN SKPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi dan Pengelolaan Informasi Publik															Tersedianya Data Statistik Sektor yang Berkualitas dan Terintegrasi																						
Indikator 90_2019	Persentase Website OPD yang Aktif										Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan									Persentase Data Statistik Sektor Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu																		
Program 90_2019	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																	
KEGIATAN 90_2019	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kota															
Sub Kegiatan 90_2019	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Layanan Hubungan Media	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Manajemen Komunikasi Krisis	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kab/Kota	Penatausahaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penatausahaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Membangun Metadata Statistik Sektor	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	Pengembangan Infrastruktur	Penyelenggaraan Organisasi Statistik Sektor di Daerah
Indikator capaian Kepmendagri Nomor 050-3728 Tahun 2020	Jumlah Regulasi yang diterbitkan	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Jumlah Informasi dan Agenda Kegiatan pemda yang dilaksanakan	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Jumlah Media Komunikasi Publik yang digunakan	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendistribusikan Informasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syaria'h di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	Jumlah berita Hoax dan disinformasi yang terklarifikasi	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dukungan kontribusi terhadap Komisi Informasi Daerah yang tersedia	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang Dilaksanakan	jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id	jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	terlaksananya SPBE yang sesuai dengan peta jalan/arsitektur spbe	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Jumlah cakupan layanan komunikasi intra (WAN) pemerintah	pengelolaan sistem keamanan informasi pemerintah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Jumlah cakupan layanan penghubung (WAN) pemerintah	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	persentase ASN yang mengikuti bimtek TIK	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti GCIO	Jumlah Laporan Movev SPBE	tersedianya kebijakan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi	terlaksananya kajian/analisis/audit kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	terlaksananya layanan keamanan informasi	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	Persentase penyajian data dan informasi statistik	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Tersedianya metadata statistik	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datanya	Tersedianya infrastruktur yang memadai	Tersedianya regulasi penyelenggara otoritas statistik
Output Kepmendagri Nomor 050-3728 Tahun 2020	4 buah	12 Aspirasi	8 kegiatan	600 Berita	4 kanal medsos	12 Permohonan	5 media	10 Kali	12 berita	45 orang	1 Kegiatan	1 kali	SK penetapan subdomain	SK penetapan subdomain	44 SKPD	47 Orang	1 Tahun	SKPD	sistem keamanan informasi pemerintah yang aman	1 Dokumen	3 Aplikasi	SKPD	2 Jenis	15%	4 orang	1 Laporan	Produk Hukum/SOP	Dokumen	1 Tahun	200 Surat	Laporan	68 Orang	Data/Laporan	34 OPD	Aplikasi/Peralatan	Produk Hukum		